

## Eksistensi Nilai Pancasila Dan Pendidikan Politik Yang Hilang Dalam Masyarakat

Ingrid Shintia Arsy<sup>1,a\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> [ingridshintiaarsy@upi.edu](mailto:ingridshintiaarsy@upi.edu)\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Februari 2024;

Revised: 20 Februari 2024;

Accepted: 2 Maret 2024.

Kata-kata kunci:

Pancasila;

Nilai;

Pendidikan Politik;

Masyarakat.

Keywords:

Pancasila;

Values;

Political Education;

Society.

: ABSTRAK

Pancasila adalah pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia, yang telah digantikan oleh ideologi lain. Pancasila merupakan dasar kesepakatan bangsa Indonesia untuk mempersatukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merumuskan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan karenanya menjadi dasar dari semua hukum dalam bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan bernegara, dan dapat disebut sebagai visi atau pandangan hidup yang menjadi tujuannya. Nilai pancasila juga diamalkan dalam bidang sosial. Nilai-nilai sosial terletak pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah negara dalam mengatasi kesenjangan sosial agar Seluruh Rakyat Indonesia menciptakan keadilan sosial untuk menciptakan pembangunan, adil atau seimbang, mencakup semua orang dan karena itu dihargai oleh semua kelompok dalam masyarakat. Pendidikan politik dianggap sebagai pendidikan nasional, khususnya pendidikan yang mampu membangkitkan semangat kebangsaan, membangkitkan kesadaran ideologis dan membentuk perilaku warga negara yang sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.

ABSTRACT

*The Existence of The Lost Pancasila Values and Political Education in Community. Pancasila is the way of life and philosophy of the Indonesian nation, which has been replaced by other ideologies. Pancasila is the basis for the agreement of the Indonesian people to unite the life of the nation and state in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Pancasila is contained in the Preamble to the 1945 Constitution. Pancasila formulates basic human values and therefore becomes the basis of all laws in society, state and state life, and can be called a vision or view of life which is the goal. Pancasila values are also practiced in the social field. Social values lie in the fifth principle of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people, which is a benchmark for the success of the state government in overcoming social inequality so that all Indonesian people create social justice to create development, fair or balanced, including all people and therefore valued by all groups in society. Political education is considered as national education, especially education that is able to raise the spirit of nationalism, raise ideological awareness and shape the behavior of citizens in accordance with the expectations of the Indonesian nation.*

Copyright © 2024 (Ingrid Shintia Arsy). All Right Reserved

How to Cite : Arsy, I. S. (2024). Eksistensi Nilai Pancasila Dan Pendidikan Politik Yang Hilang Dalam Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 111–116. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2077>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan standar untuk menilai baik dan buruk, benar dan salah sikap, tindakan dan perilaku bangsa Indonesia (Yudhyarta, 2020). Pancasila mengandung nilai-nilai luhur sebagai dasar bernegara (Nurhikmah & Nugrahaningtyas, 2021). Tiga nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis (Sutono & Purwosaputro, 2019). Pancasila merupakan lembaga negara yang memiliki sistem nilai yang pada hakekatnya merupakan satu kesatuan (Windari & Aziz, 2021). Setiap sila mengandung nilai-nilai yang berbeda, namun semuanya membentuk satu kesatuan yang sistematis (Kartini & Dewi, 2021). Pancasila sebagai sistem nilai termasuk dalam nilai moral (good values) dan sebagai nilai abstrak dasar.

Etika dalam kehidupan manusia menempati tempat yang sangat penting (Mahmud, 2019). Nilai-nilai moral merupakan bagian integral dari diri manusia, sebagai individu, maupun sebagai anggota suatu kelompok masyarakat, atau bahkan suatu bangsa (Anggraeni et al., 2020). Peradaban suatu bangsa dapat dinilai dari karakter moralnya (Faiz dkk, 2021). Moral adalah tata cara hidup, adat kebiasaan atau kebiasaan yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan individu atau kelompok sosial untuk mencapai kedewasaan (Sabani, 2019). Dalam kehidupan modern saat ini, masalah moral atau etika semakin meningkat dan meluas, baik secara kuantitas maupun kualitas (Su'dadah, 2014).

Hal ini dapat disaksikan terutama melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik yang menimbulkan keperihatinan berbagai kalangan, baik para orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh bangsa (Delta, 2017). Jika hal ini terus-menerus berlangsung tanpa adanya pengawasan yang lebih ketat dan tindakan nyata yang lebih tegas dari pihak berwenang dan pihak berkuasa, sangat dikhawatirkan akan terjadi kerusakan moral bangsa yang lebih menyeluruh dan pada akhirnya bisa bermuara pada kehancuran bangsa (Mukhtar Samad, 2016:1).

Fungsi pendidikan politik itu sendiri meliputi, fungsi pendidikan, fungsi sintesis, fungsi artikulasi, dan fungsi pendidikan nasional. Membangun keberanian bangsa merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal kemerdekaan, para founding fathers negara ini bertekad menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai hal yang urgen yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan negara. Dalam hal ini, tentunya partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam pendidikan politik yang berkarakter untuk dapat mencapai arah pembangunan politik kita di Indonesia.

Ada juga krisis moral karena nilai-nilai pancasila kini mulai luntur dan tidak lagi dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan generasi kita sendiri tidak memiliki pedoman dasar, baik pada orang tua maupun orang tua, cara berpikir yang sementara (Yuniar dkk, 2022). dari mereka yang tidak memikirkan akibat buruk yang akan datang, maka emosi mereka stabil dan masih sangat rentan, belajar, bersosialisasi tentang kehidupan, nilai-nilai moral Remaja yang cacat, kurang rasa diri untuk menjadi lebih baik (Paramitha et al., 2022). Agar hal ini dapat dijadikan acuan bagi para pendidik baik orang tua maupun guru di sekolah dan didukung oleh pemerintah untuk dapat memberikan pembelajaran di sekolah dan sosialisasi kepada generasi muda sebelum kemajuan zaman dengan tujuan agar dapat membentengi diri. diri dari hal-hal negatif yang dapat menenggelamkan mereka.

## Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode Studi Literatur. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Metode Studi Literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Peneliti mengkaji berbagai sumber utama seperti artikel, buku, surat kabar, observasi keadaan sosial lingkungan rumah dan maupun hasil studi ilmiah lainnya untuk dikaitkan dengan eksistensi nilai Pancasila dan

pendidikan politik yang dirasa sudah hilang implementasinya dalam masyarakat yang mengakibatkan permasalahan sosial.

### **Hasil dan pembahasan**

Pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal kemerdekaan, para founding father negeri ini telah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai sesuatu yang urgen dan tidak terlepas dari pembangunan nasional.

Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Hal ini berarti bahwa seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur untuk dapat menjadi dasar negara. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai instrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara obyektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Nilai-nilai Pancasila, merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia karena telah teruji dalam sejarah dan dipersepsi sebagai nilai-nilai subyektif yang menjadisumber kekuatan dan pedoman hidup seirama dengan proses adanya bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ruang.

Nilai-nilai tersebut tampil sebagai norma dan moral kehidupan yang ditempa dan dimatangkan oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia untuk membentuk dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi sumber inspirasi dan cita-cita untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila termasuk ke dalam nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang (harmonis). Hal ini dapat dibuktikan dengan susunan sila-sila dari Pancasila yang tersusun secara sistematis-hirarki. Pancasila jika dikaji dari sudut pandang metafisika, berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenal alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni.

Pancasila merupakan suatu dasar negara yang mempunyai sistem nilai yang hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya namun semua itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

Dekadensi moral anak bangsa semakin memperhatikan.Penyimpangan sosial yang sudah terjadi turun temurun seolah menjadi tradisi di masyarakat bukti nilai Pancasila yang luntur yang mengakibatkan nilai moral terbentur. Jika tidak hati-hati, bangsa ini menuju pada apa yang dinamakan the lost generation<sup>1</sup>. Karakter bangsa yang semakin menurun dari waktu ke waktu telah menjadi pembicaraan serius, mulai dari kalangan rakyat biasa sampai kepada pejabat dan kepala negara. Karakter bangsa juga tidak hanya menjadi isu lokal dan nasional, tetapi juga telah menjadi isu global.

Penyimpangan sosial merupakan segala perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.Dalam kajian Sosiologi,penyimpangan sosial disebut sebagai deviasi sosial.Penyimpangan sosial dapat dilakukan perseorangan atau secara kolektif (kelompok). Penyimpangan sosial merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun pelakunya,misalnya terganggunya keseimbangan sosial,pudarnya nilai dan norma,serta merusak unsur-unsur budaya dalam masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial dalam masyarakat antara lain, pertama penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat dan bersifat sementara, kedua penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang sulit dihentikan karena dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bisa ditoleransi, ketiga perilaku menyimpang positif,contohnya seorang perempuan bekerja sebagai sopir atau kuli bangunan.

Pendidikan Politik dalam UU No. 2 Tahun 2008 dalam Bab I pasal 1 ayat, perlu mampu membentuk warga negara yang berkepribadian utuh, terampil, serta berkesadaran tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang konsisten. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tidak dapat dilihat secara langsung tetapi membutuhkan waktu yang lama karena pendidikan politik berkaitan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

Pembangunan karakter bangsa adalah tantangan masa depan bangsa, dimana seluruh elemen bangsa, khususnya sesuai dengan undang-undang, partai-partai politik memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi perjalanan dinamika pendidikan karakter bangsa di kalangan mereka, Indonesia iklim yang kondusif sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yakni menciptakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis dan bermartabat.

Setiap permasalahan pasti ada solusi, ibarat ada jalan masuk pasti ada jalan keluar. Solusi permasalahan moral yang terjadi pada bangsa Indonesia ini terutama kepada anak bangsa selaku generasi emas, bibit-bibit unggul, calon penerus bangsa ini tidaklah serumit yang dipikirkan, mudah namun sulit diterapkan karena tingkat kesadaran diri yang rendah akan pentingnya pendidikan karakter dan moral, terutama anak agar menjadikan kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai sosial atau norma yang berlaku yang berorientasikan pada Pancasila dan UUD 1945.

Untuk memecahkan masalah sosial seperti krisis moral yang terjadi di masyarakat, Ilmu Sosiologi memiliki peranan penting didalamnya. Sosiologi sebagai ilmu murni dan terapan memiliki peranan penting dalam pembangunan masyarakat, sosiologi berguna untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian dalam proses pembangunan sosial untuk lebih baik. Pada tahap perencanaan sosiologi berfungsi memberikan fakta dan informasi mengenai kebutuhan sosial dalam masyarakat. Pada tahap pelaksanaan sosiologi berfungsi untuk memperhatikan dan memberikan informasi mengenai kekuatan sosial dalam masyarakat serta proses perubahan sosialnya dan dampaknya. Pada tahap penilaian sosiologi berfungsi untuk melakukan analisis terhadap efek atau dampak sosial dari pembangunan tersebut, untuk menjadi acuan ketika akan melakukan proses pembangunan sosial kembali (Malihah et al., 2020).

Pendidikan karakter untuk mendidik kepribadian seseorang terutama anak untuk menjadi lebih baik sangat penting dilakukan sejak dini, menurut Thomas Lickona (1992) terdapat tiga komponen karakter yang baik, yaitu: (1) Moral Knowing, adalah hal yang penting untuk diajarkan untuk membekali seseorang agar dapat mengetahui nilai-nilai kebaikan; (2) Moral Feeling, adalah sikap yang harus ditanamkan pada seseorang agar mau bertindak kebaikan kepada siapapun yang sesuai nilai-nilai sosial yang berlaku; (3) Moral Action, adalah proses adaptasi tingkah laku seseorang terhadap lingkungan yang akan ditempatinya, apakah lingkungan itu baik atau buruk.

## Simpulan

Maraknya penyimpangan sosial yang terjadi secara turun temurun seolah menjadi tradisi di setiap lapisan masyarakat seperti korupsi pejabat negeri, maraknya pelacuran, delinkuensi anak, alkoholisme, dan homoseksual di masyarakat serta seks bebas, hamil diluar nikah, aborsi, judi, minuman keras, dan penggunaan narkoba yang menghantui generasi muda menandakan terganggunya keseimbangan sosial dan pudarnya nilai serta norma yang ada di masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut juga sebagai tanda bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mulai luntur sehingga nilai moral terbentur. Tentunya kita perlu mengembalikan nilai-nilai tersebut pada kehidupan masyarakat karena Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia sehingga nilai-nilai yang ada didalamnya juga menjadi ciri masyarakat Indonesia dimana seharusnya masyarakat Indonesia hidup berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dapat menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjaga Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan sehingga terciptalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan

tentunya agar penyimpangan-penyimpangan sosial tersebut dapat diatasi. Untuk mengembalikan nilai dan mengatasi penyimpangan sosial tersebut, kita dapat mengetahui betapa diperlukannya pendidikan karakter pada setiap individu, pendidikan tersebut mulai didapat sejak masih kecil yaitu melalui didikan orang tua, dan di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan politik dilaksanakan seperti pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang mampu membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuhkan kesadaran ideologis dan membentuk perilaku warga negara yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Pendidikan politik perlu menyiapkan dan membekali sekolah untuk membangun sikap kebangsaan, yaitu menyiapkan model pendidikan yang lebih sistematis, dan harus mampu berdialog antara tradisi keilmuan dan tradisi partai, atau bekerjasama dengan dunia pendidikan, sehingga partai politik bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

## Referensi

- Ahmad Shams Madyan. (2009). *Aids Dalam Islam: Krisis Moral Atau Krisis Kemanusiaan*, Bandung : Mizan Pustaka.
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). *The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense*. 418(Acec 2019), 428–431. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Berdikarionline, (2011). *Pentingnya Pendidikan Politik Untuk Rakyat*.
- Budimansyah, D. (2009). *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokrasi*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Uiversitas Pendidikan Indonesia. 14 Mei 2009.
- Delta, R. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Atau Trafficking. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 37-56.
- Diah Ningrum.(2015).Kemerosotan Moral di Kalangan Remaja. *Jurnal UNISIA: Sebuah Penelitian Mengenai Parenting Styles dan Pengajaran Adab*, 37(8).
- Faiz, A., Soleh, B., Kurniawaty, I., & Purwati, P. (2021). Tinjauan analisis kritis terhadap faktor penghambat pendidikan karakter di Indonesia. *Jurnal basicedu*, 5(4), 1766-1777.
- Kartini, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi pancasila dalam pendidikan sekolah dasar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 113-118.
- M Noor Syaid. (2020). *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, Semarang: Alprin.
- Mahmud, A. (2019). Ciri dan Keistimewaan Akhlak dalam Islam. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(1), 29-40.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Nurhikmah, A. R., & Nugrahaningtyas, N. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 59-69.
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022). Rethinking the Relationship between Technology and Health through Online Physical Education during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(1), 132–144. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2165>
- Rachmawati, D. (2020). *Nilai-Nilai Pancasila. Dalam makalah Jurusan URUSAN Manajemen D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Universitas Persada Indonesia.
- Sabani, F. (2019). Perkembangan anak-anak selama masa sekolah dasar (6–7 tahun). *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(2), 89-100.
- Su'dadah, S. D. (2014). Kedudukan Dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Jurnal Kependidikan IAIN Purwokerto*, 2(2), 143-162.
- Sutono, A., & Purwosaputro, S. (2019). Aksiologi Pancasila. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Windari, S., & Aziz, M. I. (2021). Filsafat Dalam Sistem Nilai Pancasila. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 9-15.

- Yudhyarta, D. Y. (2020). Pemberdayaan etika pancasila dalam konteks kehidupan kampus. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(01), 43-63.
- Yuniar, R., Bintang, M. I., Ningrum, D. F., & Ritonga, R. (2022). Penguatan Nilai Nilai Pancasila sebagai Fondasi Etika Berkomunikasi pada Pembelajaran Online. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 4(1), 28-40.